

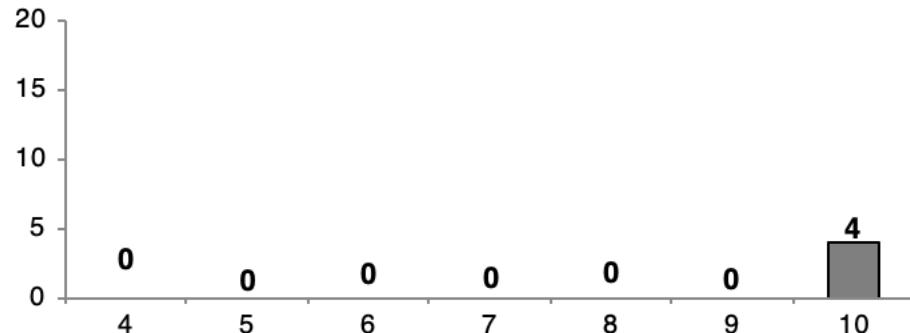
LAPORAN MEDIA CETAK

**Pj. Gubernur Jawa Tengah
Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M
(10 Januari 2025)**

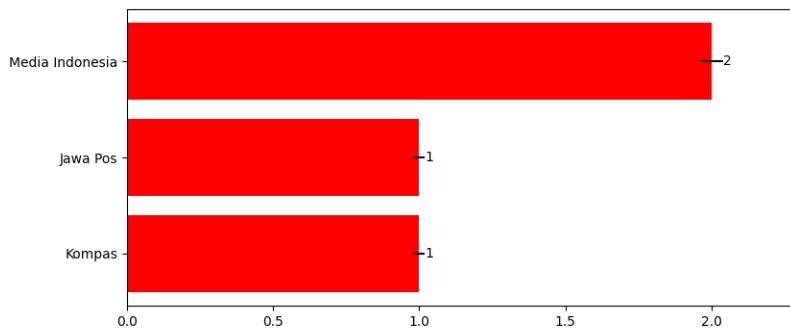
Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
3	4	4	0	0

Daily Statistic



Media Share



Influencers

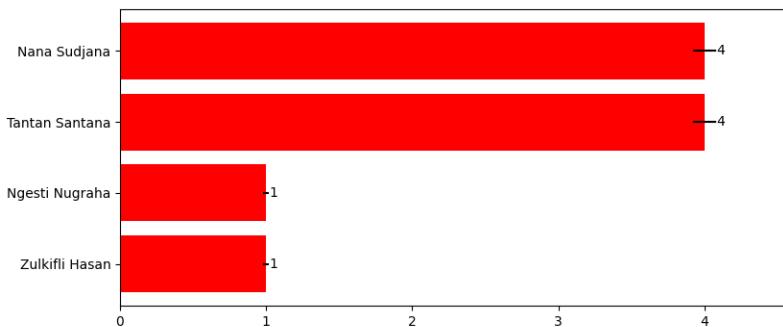


Table Of Contents : 10 Januari 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	10 Januari 2025	Media Indonesia	Program MBG terus Diperluas	8	Positive	Tantan Santana, Zulkifli Hasan, Nana Sudjana
2	10 Januari 2025	Kompas	Jumlah Kasus PMK di Jateng Terus Bertambah, Vaksinasi Digencarkan	11	Positive	
3	10 Januari 2025	Media Indonesia	Vaksin Jadi Kendala Penanggulangan PMK	2	Positive	Ngesti Nugraha, Nana Sudjana
4	10 Januari 2025	Jawa Pos	Dukung MBG, Pemprov Jateng Siapkan Rp 67,13 M	10	Positive	

Title	Program MBG terus Diperluas		
Media	Media Indonesia	Reporter	RF/MS/Ant/N-2
Date	2025-01-10	Tone	Positive
Page	8	PR Value	
Summary	<p>Di Jawa Tengah, program MBG baru menjangkau 13 daerah. "Belum semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan program makan bergizi gratis. Saat ini baru 13 daerah yang melaksanakan kegiatan tersebut," kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Magelang, kemarin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut Nana, pelaksanaan MBG secara serentak membutuhkan persiapan tempat yang tidak mudah sehingga program itu di Jawa Tengah baru terlaksana di 13 daerah. Daerah lainnya sudah mempersiapkan, tinggal menunggu waktu launching-nya. - Ia mengatakan Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran pendampingan program makan bergizi sebesar Rp67,13 miliar sebagai langkah mendukung program tersebut. Anggaran tersebut berasal dari APBD Jawa Tengah 2025. 		



ANGGARAN MAKAN BERGIZI GRATIS: Sejumlah siswa menikmati makan bergizi gratis di SDN Kedung Jaya 1, Tarah Sareal, Jawa Barat, kemarin. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan anggaran program makan bergizi gratis bisa mencapai Rp420 triliun hingga Desember 2025 dan saat ini pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp77,13 miliar untuk program di bawah Presiden Joko Widodo tersebut.

Program MBG terus Diperluas

Program makan bergizi gratis di Kota Bandung akan diperluas ke lima kecamatan tambahan. Dengan penambahan itu, total penerima manfaat mencapai 21 ribu siswa.

NANDIYANI
nandiendi@medialand.id

PROGRAM makan bersarang gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1) di Kota Bandung, Jawa Barat, berlanjut lancer. Hingga saat ini, sebanyak 6.500 siswa dari 9 sekolah dasar (SD) dan 10 sekolah tingkat pertama (SMP) telah menerima manfaat program itu. "Alhamdulillah, makannya selalu pas, enak dan sangatnya variatif. Semua makalan yang tidak termasuk dikembangkan kepada penyelesaian di atas vendor," ungkap Fitri Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Santana, kemarin.

Menurut Tantan, jumlah Siswa (137), program itu akan diperluas ke lima kecamatan tambahan, yaitu Arcamanik, Antasari, Andir, Batujungkal, dan Coblong. Dengan penambahan itu, jumlahnya 16 ribu siswa akan menerima makanan bergizi gratis sehingga total penerima manfaat mencapai 21 ribu siswa.

Peningkatan jumlah siswa

merupakan mandatnya. Pada prinsipnya siap karena ada beberapa hal yang harus ditindaklakukan pemerintah daerah seperti tempat menyimpan makanan dan cuci tangan. "Untuk jangka pendek kita punya dana Rp29 miliar melalui APBD Kota Bandung untuk menyediakan perlakuan makanan bagi 10 ribu siswa di Kota Bandung, sejak Tahun Ajaran 2025," terang Tantan.

Tantan menambahkan, targetnya adalah melanjutkan program MBG ini di seluruh 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang melaksanakan program makan bergizi gratis. Selain itu hari ini 13 daerah yang belum dilakukan kerja sama dengan Pemprov Jateng dan Badan Gizi Nasional (BGN) dan diawasi secara ketat. Saat ini, terdapat tiga daerah yang belum dilakukan kerja sama dengan BGN yakni Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

Menurut Nana, pelaksanaan MBG secara serentak membutuhkan persiapan tempat yang tidak mudah sehingga berjaya, tetapi juga aman. "Rejornya yang menghubungkan seluruh makanan bersarang di Jawa Tengah," kata Nana sesudah Gebyar SD Negeri 6 Pangkalpinang, kemarin.

Menurut Nana, untuk mendukung program pemerintah tersebut, Pemprov Jateng telah memberikan dana pembangunan di Pangkalpinang sebesar Rp67,13 miliar," kata Nana sesudah meresmikan makanan bersarang di Jawa Tengah memang hampir 13 kabupaten/kota yang sudah siap. Daurah lainnya sudah me-

persiapkan, tinggal menunggu waktu launching-nya. "Memang tidak mudah untuk kita mempersiapkan tempat pelayanan pemenuhan gizi atau dapurnya. Dalam waktu dekat ini kita akan menyiapkan itu," ujar Nana.

Ia mengatakan Pemprov Jateng memberikan dana pembangunan program makan bersarang sebesar Rp67,13 miliar sebagai langkah mendukung program tersebut. Anggaran tersebut berasal dari APBD Jateng 2025.

Awal Februari Nana meresmikan di Pangkalpinang bahwa program makan bersarang di Sorong akan dimulai pada 1 Februari. Pejabat di lingkungan Pemprov Jateng berharap agar program ini dapat berjalan dengan lancar.

"Semua dapur telah direfreski langsung oleh pusat Kebersihan Izn operasional. Pemprov Jateng telah memberikan dana pembangunan di Pangkalpinang sebesar Rp67,13 miliar," kata Nana sesudah meresmikan makanan bersarang di Jawa Tengah memang hampir 13 kabupaten/kota yang sudah siap. Daurah lainnya sudah me-

persiapkan, tinggal menunggu waktu launching-nya. "Memang tidak mudah untuk kita mempersiapkan tempat pelayanan pemenuhan gizi atau dapurnya. Dalam waktu dekat ini kita akan menyiapkan itu," ujar Nana.

Menurut Nana, pelaksanaan MBG secara serentak membutuhkan persiapan tempat yang tidak mudah sehingga berjaya, tetapi juga aman. "Rejornya yang menghubungkan seluruh makanan bersarang di Jawa Tengah," kata Nana sesudah Gebyar SD Negeri 6 Pangkalpinang, kemarin.

Menurut Nana, untuk mendukung keberlanjutan program itu agar lebih banyak siswa, baik dari sekolah ne-

gar maupun swasta, dapat

pun semakin padat di SD, SMP, TK, Pembimbingan, SMP 3, dan SMP 2. "Empat dapur ini masingnya yang akan menyiapkan MBG bagi 3.500 siswa di Pangkalpinang," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa makanan-rejornya, dagang ayam, daging sapi, ikan, sosis, dan buah. "Tidak salah satunya, tapi namanya antaranya hidangan dingin, dingdong sapi, atau ikan," imbuhnya.

Io menambahkan, program MBG di Kota Pangkalpinang ini merupakan hasil kerja sama dengan APBN. "Kami siap dukung program MBG Pak Presiden ini melalui DAI SG nantinya. Harapannya, Ingat menengahnya standar yang diberikan seperti apa, atau ikatan," imbuhnya.

Di Kota Sorong, Papua, pekerjaan pembangunan gedung dapur dilakukan di Jalan Jendral Soedirman pada 1 Januari. Sorong akan menjadi daerah pertama di Papua yang akan melaksanakan program tersebut pada awal Februari. Pelajar di Sorong berharap agar program ini berjalan dengan lancar.

"Saya mohon agar semua berkomunikasi antara pemerintah dan pihak TNI terkait dengan penerapan program makan bersarang gratis di Kota Sorong.

Distrirk Sorong Barat akan menulis contoh surat pelaporan program makan bersarang gratis semacam yang dilakukan di Bogor saat raja ratap koordinasi bersama Kodim 1802/Sorong sebagai bagian Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (RIF/MSAHN).

Title	Jumlah Kasus PMK di Jateng Terus Bertambah, Vaksinasi Digencarkan		
Media	Kompas	Reporter	XTD
Date	2025-01-10	Tone	Positive
Page	11	PR Value	
Summary	<p>Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah daerah di Jawa Tengah terus bertambah. Pemerintah menggencarkan vaksinasi terhadap sapi-sapi yang sehat dan pengobatan terhadap sapi-sapi yang sakit untuk menekan jumlah kematian sapi karena PMK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewab Jawa Tengah, hingga Rabu (8/1/2025) pukul 23.59 WIB ada 2.666 sapi di Jawa Tengah yang terduga terjangkit PMK Junlah itu bertambah 279 ekor dari sehari sebelumnya, yakni 2.387 ekor. Selain itu, jumlah kematian sapi yang terpapar PMK juga bertambah Pada Babu (8/1) jumlah sapi yang mati karena PMK 76 ekor atau bertambah 20 ekor dari sehari sebelumnya, Selasa (7/1). - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk satuan tugas penanganan PMK sejak 2022 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 443/38. Anggota satgas itu terdiri dari pemerintah daerah, kepolisian, komando daerah militer, Balai Karantina Pertanian, Perhutani, Balai Besar Veteriner Wates, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Tengah, dan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Jawa Tengah. - "Kami terus meningkatkan penanganan terhadap PMK, di antaranya dengan melakukan vaksinasi dan memperketat pengawasan di pasar-pasar hewan. Kami dari pemerintah provinsi dan kabupaten /kota juga sudah membuat surat edaran bagaimana menanggulangi, mengantisipasi, dan menangani PMK ini," kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. 		

PETERNAKAN

Jumlah Kasus PMK di Jateng Terus Bertambah, Vaksinasi Digencarkan

SEMARANG, KOMPAS — Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah daerah di Jawa Tengah terus bertambah. Pemerintah menggencarkan vaksinasi terhadap sapi-sapi yang sehat dan pengobatan terhadap sapi-sapi yang sakit untuk menekan jumlah kematian sapi karena PMK.

Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng, hingga Rabu (8/1/2025) pukul 23.59 WIB ada 2.666 sapi di Jateng yang terduga terjangkit PMK. Jumlah itu bertambah 279 ekor dari sehari sebelumnya, yakni 2.387 ekor.

Selain itu, jumlah kematian sapi yang terpapar PMK juga bertambah. Pada Rabu (8/1), jumlah sapi yang mati karena PMK 76 ekor atau bertambah 20 ekor dari sehari sebelumnya. Sesua (7/1).

"Pertambahan ini karena surveilans di kabupaten/kota

meningkat sehingga semakin banyak ditemukan kasus-kasus yang kemudian dilaporkan kepada kami," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Hariyanta Nugraha, Kamis (9/1).

Ia memaparkan, tidak semua sapi yang dituding terjangkit PMK itu dalam kondisi sakit. "Memang ada penanganan kesehatan, misal diberi vitamin, tetapi itu juga kami masukkan ke data suspect atau terduga," ujar Hariyanta.

Dia menambahkan, untuk mencegah penyebaran PMK, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng bakal menggencarkan vaksinasi terhadap sapi-sapi yang sehat. Instansi itu juga telah mendistribusikan 8.750 dosis vaksin PMK ke 15 kabupaten/kota di Jateng.

Wilayah yang mendapatkan alokasi vaksin adalah Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar. Selain itu, Sukoharjo, Boyolali, Kota Semarang, Brebes, Purworejo, dan Kebumen.

Cakupan vaksinasi PMK hingga saat ini 50 persen dari jumlah sapi yang telah dialokasikan.

Vaksinasi ditargetkan selesai pekan depan.

Hariyanta Nugraha

aksi di kandang atau pasar hewan, serta menyelidiki asal-usul penularan.

Penutupan pasar hewan, de Haryanta, belum dilakukan di sejumlah daerah. Vaksinasi akan dilakukan dan ditargetkan selesai pekan depan," ucap Hariyanta.

Menurut dia, para petugas memerlukan waktu untuk mendata sapi-sapi sehat yang akan menjadi sasaran vaksinasi. Sapi-sapi yang berada dalam satu kandang atau satu area dengan sapi yang akan divaksin juga harus dipastikan dalam kondisi sehat. Selain itu, sapi yang akan divaksin juga harus cukup umur.

Tak hanya menunggu ban-

tuhan vaksin dari pemerintah, peternak, terutama peternak sapi-sapi yang sehat, juga didorong untuk melakukan vaksinasi man-

dirt terhadap sapi-sipinya. Vaksin PMK mandiri, kata Hariyanta, mudah didapatkan dan harganya terjangkau, yakni Rp 17.000-Rp 20.000 per dosis. Penyuntikan vaksin mandiri dapat dilakukan oleh menteri atau dokter hewan swasta.

"Kami juga mengajak para peternak untuk mengajak sapi-sapi yang sehat atau diduga terjangkit PMK ke klinik vaksinasi PMK terdekat di Jateng. Menurut Kepala Dinas Peternakan, Pertanian, Peternakan, dari Periklanan Kabupaten Blora Ngagilan, usulan untuk penutupan pasar he-

wan akan disampaikan dalam rapat koordinasi pada Jumat (10/1) pagi.

"Blora termasuk daerah dengan kasus PMK tertinggi, hingga kini ada 447 kasus. Sapi di Blora kebanyakan sapi potong yang mobilitasnya tinggi, tidak semuanya dari Blora, tetapi juga dari luar daerah," ujar Ngagilan.

La menyebut cuaca yang tidak menentu turut membuat daya tahan tubuh sapi melemur.

"Kami juga mengawasi lalu lintas hewan ternak dari Jawa Timur yang melalui pintu-pintu tol, seperti di Sragen. Sapi-sapi itu harus dalam kondisi sehat dan disertai dengan surat veteriner," tuturnya.

Upaya menutup pasar hewan di Blora, willyaunya yang melalukan vaksinasi dan pengecekan pada sapi-sapi yang sehat, juga dilakukan di kabupaten/kota lain di Jateng. Menurut Kepala Dinas Peternakan, Pertanian, Peternakan, dari Periklanan Kabupaten Blora Ngagilan, usulan untuk penutupan pasar he-

sakit setelah vaksinasi.

Pemerintah Provinsi Jateng telah membentuk satuan tugas penanganan PMK sejak

melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 443/38. Anggota satgas itu terdiri dari pemerintah daerah, kepolisian, komando daerah militer, Balai Karantina Pertanian, Perhutani, Balai Besar Veteriner Wates, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jateng, dan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Jateng.

"Kami terus meningkatkan penanganan terhadap PMK, di antaranya dengan melakukan vaksinasi dan memperketat pengawasan di pasar-pasar hewan. Kami dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga sudah membuat surat edaran bagaimana menanggulangi, mengantisipasi, dan menangani PMK ini," kata Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana. (XTD)

Title	Vaksin Jadi Kendala Penanggulangan PMK		
Media	Media Indonesia	Reporter	Tim X-3
Date	2025-01-10	Tone	Positive
Page	2	PR Value	
Summary	<p>Kendala keterbatasan vaksin menyulitkan pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) di sejumlah wilayah. Banyaknya hewan ternak yang belum disuntik vaksin di tengah meningkatnya kasus PMK sejak Desember 2024 memunculkan potensi penyebaran lebih besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Kabupaten Semarang, Jawa tengah, Bupati Ngesti Nugraha mengaku khawatir karena ada sekitar 48 ribu ternak belum mendapat vaksin. Begitu pula di Kabupaten Batang, menurut Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang, Windu Suriadji, mereka bahkan hanya memiliki dua vial vaksin yang cukup untuk 50 ternak. Di Jawa Tengah, kasus PMK juga terpantau meningkat di Temanggung, Jepara, dan Klaten - Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengklaim penanganan kasus PMK di provinsi itu terus ditingkatkan. Di antaranya dengan vaksinasi dan memperketat pengawasan di pasar hewan. Ia menjelaskan, berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah per Januari 2025, ternak yang diduga terserang PMK di Jawa Tengah sebanyak 2.666 ekor dari total populasi 5,5 juta ekor. 		

Vaksin Jadi Kendala Penanggulangan PMK

KENDALA keterbatasan vaksin menyulitkan pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) di sejumlah wilayah. Banyaknya hewan ternak yang belum disuntik vaksin di tengah meningkatnya kasus PMK sejak Desember 2024 memunculkan potensi penyebaran lebih besar.

Di Kabupaten Semarang, Jawa tengah, Bupati Ngesti Nugraha mengaku khawatir karena ada sekitar 48 ribu ternak belum mendapat vaksin. "Keterbatasan jumlah vaksin saat ini menjadi kendala dan jika sudah terserang PMK, dampaknya cukup berat," ujarnya.

Begitu pula di Kabupaten Batang, menurut Kepala Dinas

Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Windu Suriadiji, mereka bahkan hanya memiliki dua vial vaksin yang cukup untuk 50 ternak. Meski pencegahan terus dilakukan dengan menurunkan petugas kesehatan hewan ke desa-desa, minimnya vaksin dihawatirkam membuat wabah PMK tak terbendung.

"Kami kesulitan mencegah PMK karena vaksin yang kami miliki terbatas, sedangkan jumlah ternak belum divaksin masih ribuan ekor," ujar Windu.

Di Jawa Tengah, kasus PMK juga terpantau meningkat di Temanggung, Jepara, dan Klaten. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengklaim penanganan

kasus PMK di provinsi itu terus ditingkatkan. Di antaranya dengan vaksinasi dan memperketat pengawasan di pasar hewan.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng per 9 Januari 2025, ternak yang diduga terserang PMK di Jateng sebanyak 2.666 ekor dari total populasi 5,5 juta ekor.

Sementara itu, di Jawa Timur, Dinas Peternakan mengaku sedang menyiapkan vaksin pengadaan dari APBD dan APBN. "Dari bantuan pusat kita *dropping* 12.500 vaksin untuk kondisi *emergency*. Yang lainnya menyusul," kata Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Aryani.

Sebagai langkah lain, Pemprov Jatim menutup dua pasar hewan di Ponorogo dan Tulungagung untuk mencegah PMK merebak ke daerah lain atau ternak lain.

Meningkatnya kasus PMK juga dilaporkan di Bandung Barat, Cianjur, dan Tasikmalaya di Jawa Barat, juga di Agam, Sumatra Barat.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda, menyampaikan pihaknya akan segera mendistribusikan vaksin PMK sebanyak 4 juta dosis. Pelaksanaan bulan vaksinasi dibagi dua tahap, yaitu periode satu Januari-Februari dan periode kedua Juli-Agustus. (Tim/X-3)

Title	Dukung MBG, Pemprov Jateng Siapkan Rp 67,13 M		
Media	Jawa Pos	Reporter	aya/dri
Date	2025-01-10	Tone	Positive
Page	10	PR Value	
Summary	<p>Belum seluruh daerah di Jawa Tengah menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) sejak dimulai Senin (6/1) lalu. Tercatat baru 13 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan program besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hal itu disampaikan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat berkunjung ke Kota Magelang untuk meresmikan Jembatan Rejosari kemarin (9/1). Namun, dia tidak merinci daerah mana saja yang sudah memulai MBG itu. Dia melanjutkan, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan alokasi anggaran Rp67,13 miliar untuk mendukung program itu. 		

Dukung MBG, Pemprov Jateng Siapkan Rp 67,13 M

Baru Berjalan di 13 Kabupaten



Anggarannya dari pemerintah pusat. Dana APBD Rp 67,13 miliar itu hanya bersifat dukungan."

NANA SUDJANA
Pj Gubernur Jateng

MAGELANG – Belum seluruh daerah di Jawa Tengah menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) sejak dimulai Senin (6/1) lalu. Tercatat baru 13 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan program besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana saat berkunjung ke Kota Magelang untuk meresmikan Jembatan Rejosari kemarin (9/1). Namun, dia tidak merinci daerah mana saja yang sudah memulai MBG itu.

"Tunggu waktu launchingnya. Sebab, memang tidak

itu. MBG nanti tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), serta anak di bawah usia lima tahun (balita).

Nana menyampaikan, program tersebut dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun mitra. SPPG bertugas menyediakan dan memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Sementara pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, diminta menyiapkan data lokus sasaran.

"Anggarannya dari pemerintah pusat. Dana APBD Rp 67,13 miliar itu hanya bersifat dukungan untuk mendampingi anggaran yang sudah dialokasikan BGN," tegasnya. (aya/dri)

mudah bagi kami untuk mempersiapkan tempat, layanan penuhan gizi, atau dapur umumnya," katanya.

Dia melanjutkan, Pemprov Jateng telah menyiapkan alo-

kasi anggaran Rp 67,13 miliar untuk mendukung program